

# HAMBATAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA DUMAI DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh: Muhammad Arief  
Pembimbing : Dr. Saiman, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks interdependensi kompleks yang mencerminkan saling ketergantungan ekonomi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Kadin Dumai dalam meningkatkan hubungan perdagangan bilateral serta menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji aspek regulasi perdagangan, birokrasi, serta keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas peran Kadin Dumai dalam dinamika interdependensi perdagangan regional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi mencakup regulasi perdagangan lintas negara yang kompleks, birokrasi yang belum terintegrasi dengan baik, serta keterbatasan infrastruktur logistik di Kota Dumai. Selain itu, asimetri informasi pasar dan minimnya keterlibatan sektor swasta dalam formulasi kebijakan perdagangan turut memperumit hubungan interdependensi kompleks antara pelaku usaha di kedua negara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan koordinasi antara Kadin Dumai dengan pemerintah pusat dan daerah, penguatan diplomasi ekonomi melalui forum bilateral, serta optimalisasi program misi dagang dan pameran dagang sebagai instrumen penguatan keterhubungan ekonomi lintas batas.

**Kata Kunci:** Kadin Dumai, interdependensi kompleks, kerja sama perdagangan, hambatan perdagangan, hubungan bilateral, misi dagang, pameran dagang.

## ABSTRACT

*The Chamber of Commerce and Industry (Kadin) of Kota Dumai plays a strategic role in facilitating trade cooperation between Indonesia and Malaysia, particularly within the framework of complex interdependence, which reflects the economic interconnection between the two countries. This study aims to identify the obstacles faced by Kadin Dumai in enhancing bilateral trade relations and to analyze the strategies that can be implemented to overcome these challenges. Using a qualitative descriptive approach, this research examines trade regulations, bureaucratic factors, and infrastructure limitations that affect Kadin Dumai's effectiveness in the dynamics of regional trade interdependence.*

*The findings indicate that the main barriers include complex cross-border trade regulations, inefficient bureaucratic processes, and inadequate logistical infrastructure in Dumai City. Furthermore, asymmetric market information and the limited involvement of the private sector in trade policy formulation further complicate the complex interdependence between business actors in both countries. To address these challenges, strategies such as strengthening coordination between Kadin Dumai and central and regional governments, enhancing economic diplomacy through bilateral forums, and optimizing trade missions and exhibitions as instruments to strengthen cross-border economic connectivity are essential.*

**Keywords:** *Kadin Dumai, complex interdependence, trade cooperation, trade barriers, bilateral relations, trade mission, trade exhibition.*

## LATAR BELAKANG

Fenomena globalisasi menyebabkan perlunya lingkup bisnis internasional dibingkai dalam aturan dan norma tertentu melalui lembaga-lembaga yang diselenggarakan di tingkat Eropa dan dunia. Oleh karena itu, dibangunlah lembaga-lembaga internasional untuk memfasilitasi dan mengatur perdagangan bebas. Salah satu organisasi non-pemerintah tertua dan paling berpengaruh yang mendukung perdagangan dan mempromosikan hubungan ekonomi internasional adalah kamar dagang dan industri masing-masing negara. Setiap sistem terdiri dari kamar dagang dan industri daerah dan nasional yang independen.<sup>1</sup>

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi

ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.<sup>2</sup>

Posisi strategis Kota Dumai yang terletak di jalur perdagangan tersibuk dunia, Selat Melaka merupakan sebuah potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini juga didukung dengan dibangunnya jalan tol Trans-Sumatera meningkatkan konektivitas antar wilayah di pulau Sumatera. Terhubungnya jalan tol Trans-Sumatera ke Kota Dumai menjadikan pergerakan barang dan orang (movement of goods and peoples) lebih efisien dan mengurangi waktu tempuh. Kota Dumai juga memiliki bandara Pinang Kampai yang dapat menjadi pusat pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan. Penguatan jaringan perdagangan dan pengintegrasian ke pasar internasional merupakan peluang bagi kota Dumai dengan pelabuhannya yang strategis di Selat Melaka. Dalam pengembangan jaringan perdagangan ini, tentunya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pihak swasta dan pemerintah untuk mendorong

---

<sup>1</sup> Diana Ramona Popescu, "The Role of Chamber of Commerce System in International Economic Relations," *The Romanian Economic Journal* 19, no. 62 (2016).

---

<sup>2</sup> KADIN INDONESIA, "Sejarah Kadin - Kadin Indonesia," KADIN INDONESIA, 2024, <https://kadin.id/en/tentang-kadin/sejarah-kadin/>.

pengembangan ekonomi lokal di Kota Dumai.<sup>3</sup>

Pelabuhan Dumai merupakan salah satu gerbang ekspor bagi produk Indonesia ke luar negeri yang sudah melayani pengiriman petikemas atau kontainer sejak 2020. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Dumai, komoditas unggulan yang diekspor melalui pelabuhan Dumai adalah kelapa sawit dan produk turunannya dengan jumlah 4,3 juta ton pada tahun 2023 atau 46% dari total ekspor melalui pelabuhan Dumai. Komoditas lainnya yang diekspor melalui pelabuhan Dumai adalah asam lemak dan ampas sisa olahan sawit yang masing-masingnya sebesar 1,2 juta ton atau 13% dari total ekspor melalui pelabuhan Dumai.<sup>4</sup>

Dalam pentas internasional, Kota Dumai merupakan bagian dari kerjasama multilateral Indonesia Malaysia Thailand – *Growth Triangle* (IMT-GT), yaitu kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam meningkatkan perdagangan ketiga negara tersebut yang dibentuk pada tahun 1993. Kerjasama ini diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohammad, mantan Presiden Indonesia, Suharto dan mantan Perdana Menteri Thailand, Chuan Leekpai yang diformalisasikan di Langkawi, Malaysia.<sup>5</sup>

Selain kerjasama multilateral, Kota Dumai juga berpartisipasi dalam kerjasama bilateral Kertas Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo), tepatnya pada lini Sumatera

yang juga diikuti Provinsi Kepulauan Riau, Negeri Melaka, dan Negeri Johor. Kerjasama sosial ekonomi ini awalnya merupakan bagian pengembangan kerjasama keamanan General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC-MALINDO) tahun 1967 yang direvisi pada 1972 lalu dikembangkan pada 1984 untuk mengakomodir permintaan saat itu. KK Sosek Malindo Johor/Melaka – Riau sendiri dibentuk pada 2001 dan dikembangkan pasca pemekaran provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 menjadi KK Sosek Malindo Johor/Melaka – Riau/KEPRI. Tujuan dibentuknya JKK/KK Sosek Malindo adalah untuk mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan sosial ekonomi untuk kepentingan bersama khususnya di daerah perbatasan kedua negara melalui kerjasama Sosek Malindo.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Kadin Dumai sebagai wadah dunia usaha dan dunia industri yang berkedudukan di Kota Dumai sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk region Sumatera Bagian Tengah memiliki peranan penting untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Malaysia. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan Diplomasi Komersial yang dilakukan oleh Kadin Dumai dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Malaysia sebagai negara yang memiliki kedekatan (proximity) secara geografis maupun secara kultural.

## METODOLOGI

<sup>3</sup> Wafa Adila dkk., "Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Dumai," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20, no. 1 (June 25, 2023): 157–68, <https://doi.org/10.59050/jian.v20i1.180>.

<sup>4</sup> Dinas Perdagangan Kota Dumai, *Potensi Ekspor Dumai 2024*, 2024.

<sup>5</sup> IMT-GT, "About IMT-GT," *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, January 11, 2023, <https://imtgt.org/about-imt-gt/>. Diakses pada 5 Mei 2024.

<sup>6</sup> Abdul Rahim Anuar dan Abubakar Eby Hara, "Little Brother-Big Brother Relationship Through Malaysia-Indonesia Sosek-Malindo Initiatives," *Proceedings of the 5th International Conference on International Studies (ICIS 2014)* "GLOBALIZATION AND NATION-STATES: DYNAMICS AND IMPLICATIONS OF THE INTERACTIONS BETWEEN GOVERNMENT, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY," 2014, 710–21, hlm. 714.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan memaparkan dampak hambatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai dalam meningkatkan kerjasama perdagangan antara pengusaha Indonesia dan Malaysia. penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari informasi terkait penelitian melalui buku, jurnal dan artikel beserta *press release* yang dapat diakses baik secara fisik maupun melalui internet (*online*).

## HASIL DAN DISKUSI

Sejak kemerdekaan Indonesia dan Malaysia, hubungan bilateral kedua negara telah dibentuk oleh tantangan historis, terutama 'Ganyang Malaysia' selama era Konfrontasi (1963-1966). Warisan ini terus berlanjut, dengan masalah yang sedang berlangsung yang mencakup penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia, terorisme, perselisihan budaya dan teritorial di Laut Sulawesi (Blok ND6 dan ND7 atau Ambalat) dan Laut Sulu (melibatkan konflik di Sipadan dan Ligitan). Masalah-masalah ini mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam hubungan mereka. Periode pasca-Konfrontasi telah melihat klaim yang tumpang tindih di Laut Sulawesi (ND6 dan ND7) muncul sebagai masalah yang sangat kontroversial, yang mengintensifkan penggambaran negatif Malaysia di media Indonesia. Perselisihan ini semakin dipicu

oleh tuduhan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja Indonesia di Malaysia. Potensi eskalasi masalah ini menyoroti perlunya penanganan yang cermat dan serius untuk mencegah ketegangan lebih lanjut dalam hubungan bilateral.<sup>8</sup>

Namun, perselisihan dan tantangan antara Malaysia dan Indonesia tidak mungkin meningkat menjadi konflik atau perang besar-besaran. Perkembangan terkini dalam tantangan keamanan domestik dan regional telah memaksa kedua pemerintah untuk berkolaborasi, meningkatkan kerja sama karena perubahan lanskap keamanan. Perspektif ini sejalan dengan liberalisme, yang berpendapat bahwa kerja sama internasional adalah cara paling efektif untuk mengatasi masalah bilateral. Berbeda dengan realisme, liberalisme menyatakan bahwa meskipun terjadi anarki dalam hubungan internasional, elemen-elemen seperti saling ketergantungan negara dapat mengurangi potensi konflik. Perkembangan terkini, seperti usulan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, menunjukkan potensi perluasan kerja sama dan saling ketergantungan antara Malaysia dan Indonesia.<sup>9</sup>

Hubungan bilateral dan multilateral antara Dumai dan Malaysia termaktub dalam setidaknya 2 (dua) kerjasama yang disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Federasi Malaysia, yaitu Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Jawatankuasa Kerja/Kertas Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo). IMT-GT didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi

---

<sup>7</sup> Ramli Dollah dkk, "Exploring the Interdependence Model in Malaysia-Indonesia Relations: Insights from Sabah, Malaysia," *Intellectual Discourse* 32, no. 1 (June 28, 2024), <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.1943>.

---

<sup>8</sup> Markus Pilgrim, *National Chambers of Commerce A Primer on the Organization and Role of Chamber Systems* (Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE), 1995).

<sup>9</sup> *Ibid.*

negara-negara anggota dan provinsi-provinsi di ketiga negara anggota, dengan memanfaatkan komplementaritas dan keunggulan komparatif yang mendasarinya.<sup>10</sup> Pelabuhan Dumai memiliki peran yang signifikan dalam transportasi domestik di sepanjang sisi timur Pulau Sumatera, menghubungkan beberapa pelabuhan dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, perdagangan barang, dan pasokan logistik. Selain itu, Pelabuhan Dumai merupakan titik pertemuan dua koridor ekonomi, yaitu Koridor Ekonomi Aceh–Palembang dan Koridor Ekonomi Dumai–Melaka. Dengan posisi strategis ini, Dumai (melalui Pelabuhan Dumai) memegang peranan penting dalam menghubungkan kepentingan ekonomi Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Pelabuhan Dumai secara khusus menangani berbagai jenis kargo seperti kargo curah kering, kargo umum, dan kargo minyak bumi.<sup>11</sup>

Sejak dibukanya kembali perbatasan di Selat Malaka, banyak pelabuhan telah muncul dan telah melipatgandakan jumlah jalur lintas Selat. Lalu lintas lintas Selat memfasilitasi perdagangan, meningkatkan integrasi ekonomi regional dan menyediakan akses yang lebih baik ke pasar global. Kebijakan pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ini, khususnya dengan mendukung pengembangan pelabuhan kecil yang khusus dalam "perdagangan barter" (perdagangan berdasarkan kompensasi atau pertukaran). Lalu lintas ini berkembang dengan baik terutama di dua ujung Selat, di utara antara provinsi Aceh

dan negara bagian Penang dan Perak, dan di selatan antara provinsi Riau dan negara bagian Melaka, Negeri Sembilan dan Johor: bagian selatan Selat Malaka menyumbang sebagian besar lalu lintas lintas karena keberadaan berbagai pulau dan perairan dangkal.<sup>12</sup>

Meskipun berkembang pesat, aktivitas perdagangan barter lintas Selat cenderung tidak terlihat oleh pihak berwenang dan terancam terdesak, baik secara fisik maupun finansial. Secara fisik, pentingnya menyediakan fasilitas yang memadai untuk peti kemas dan perdagangan curah besar dapat mengakibatkan berkurangnya ruang dan fasilitas yang tersedia untuk perdagangan kecil seperti perdagangan barter. Secara finansial, investasi dalam fasilitas untuk perdagangan barter tidak menarik bagi operator pelabuhan besar, misalnya, sejauh menyangkut perdagangan barter, terdapat kekurangan investasi di Southport Port Klang, terminal yang mengkhususkan diri dalam menangani perdagangan barter antara Indonesia dan Malaysia. Satu isu sensitif lainnya adalah salah persepsi tentang perdagangan ini. Perdagangan barter antara kedua pantai Selat dianggap sebagai aktivitas yang berbatasan dengan penyelundupan oleh beberapa segmen otoritas, meskipun memiliki keuntungan ekonomi dan kebutuhan politik.<sup>13</sup>

Perdagangan barter mulai mengalami penurunan semenjak adanya regulasi yang membatasi impor di pelabuhan Dumai. Regulasi tersebut merupakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam

<sup>10</sup> Asian Development Bank, Regional and Subregional Program Links: Mapping the Links between ASEAN and the GMS, BIMP-EAGA, and IMT-GT (Manila: ADB, 2014), hlm. 5-6.

<sup>11</sup> Awani Irewati, "The Challenges of Constructing the Connectivity between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 1 (June 30, 2020): 1–15, <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i1.159>, hlm. 10-11.

<sup>12</sup> Nathalie Fau, Sirivanh Khonthapane, and Christian Taillard, *Transnational Dynamics in Southeast Asia: The Greater Mekong Subregion and Malacca Straits Economic Corridors* (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017).

<sup>13</sup> *Ibid.*

Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang diubah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Ketiga peraturan ini secara efektif membatasi impor melalui pelabuhan Dumai hanya untuk segmen Makanan dan Minuman serta Limbah B2.

Di luar konteks perdagangan barter, Kota Dumai juga menunjukkan peranan strategis dalam perdagangan internasional, sebagaimana tercermin dari realisasi ekspor selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, total volume ekspor mencapai 10.867.210,89 ton dengan nilai transaksi sebesar USD 9.570.136.441,58. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 9.848.954,05 ton dengan nilai transaksi USD 9.435.684.075,13, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 9.299.968,22 ton dengan nilai transaksi sebesar USD 6.413.372.049,19. Dari total volume ekspor tahun 2023, sebanyak 4.282.339,44 ton atau 46% berasal dari produk dengan kode HS 1511, yaitu minyak kelapa sawit dan turunannya, menjadikan komoditas ini sebagai andalan utama ekspor Dumai.<sup>14</sup>

Produk-produk yang dikirim melalui Pelabuhan Dumai menjangkau 65 negara tujuan, dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama pada tahun 2023. Volume ekspor ke Tiongkok mencapai 2.335.961,06 ton atau 25% dari total ekspor Dumai, dengan nilai transaksi sebesar USD 1.625.381.859,12, yang juga menyumbang 25% dari keseluruhan nilai ekspor kota ini. Di sisi lain, PT Wilmar

Nabati Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar di Dumai pada tahun 2023, dengan kontribusi sebesar 2.118.291,80 ton atau 23% dari total volume ekspor, dan nilai transaksi mencapai USD 1.726.882.277,03. Data ini menunjukkan peran dominan sektor minyak kelapa sawit dan perusahaan besar dalam mendorong perekonomian Kota Dumai di pasar global.<sup>15</sup>

Kota Dumai memainkan peran penting dalam industri minyak dan gas bumi (migas), tidak hanya sebagai pusat pengolahan tetapi juga sebagai penggerak ekspor komoditas migas strategis. Pada tahun 2023, Dumai mencatat ekspor produk dengan kode HS 2713, yaitu kokas petroleum, bitumen petroleum, dan residu lainnya dari minyak petroleum atau minyak dari mineral bitumen, sebesar 254.121,71 ton, yang menyumbang sekitar 3% dari total ekspor kota tersebut. Selain itu, produk dengan kode HS 2710, yaitu minyak petroleum dan minyak dari mineral bitumen, juga diekspor dengan volume sebesar 163.057,67 ton atau sekitar 2% dari total ekspor, tetapi memiliki nilai transaksi yang signifikan sebesar USD 152.225.099,42.<sup>16</sup>

PT Kilang Pertamina Internasional, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor migas, menjadi salah satu eksportir utama dari Dumai dengan total ekspor sebesar 312.142,13 ton pada tahun 2023. Data ini menegaskan bahwa sektor migas, melalui kontribusi perusahaan seperti Pertamina, tetap menjadi salah satu penopang utama ekspor Kota Dumai, baik dalam volume maupun nilai transaksi, dan memberikan dampak strategis terhadap perekonomian kota serta perdagangan internasional Indonesia.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Dinas Perdagangan Kota Dumai, Potensi Ekspor Dumai 2024, 2024.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Hal ini juga didukung dengan dibangunnya Tol Pekanbaru-Dumai yang tidak hanya membuka jalur konektivitas baru antara Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Jalan tol ini akan menghubungkan berbagai kawasan produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempersingkat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra. Ujung utara tol ini juga akan mempermudah akses ke Pelabuhan Bandar Sri Junjungan di Kota Dumai, yang berperan sebagai pintu masuk bagi para pedagang internasional melalui Selat Malaka.<sup>18</sup>

Pelabuhan Peti Kemas Internasional Dumai juga memainkan peran strategis sebagai gerbang ekonomi di wilayah Riau, mendukung perdagangan internasional produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan. Sebagai simpul logistik, pelabuhan ini mengintegrasikan moda transportasi laut dan darat, meningkatkan efisiensi distribusi barang domestik dan ekspor. Dengan luas lahan yang diperluas hingga 71,39 hektare, desain infrastrukturnya mengacu pada pelabuhan kelas dunia seperti Rotterdam untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat serta daya saing ekonomi wilayah.<sup>19</sup> Pembangunan pelabuhan ini juga diproyeksikan mendorong ekspor nasional, mempercepat pengiriman bahan baku industri, dan memperkuat rantai pasok. Integrasi pelabuhan dengan kawasan industri diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal di

pasar internasional. Secara sosial dan ekonomi, pelabuhan ini diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan sektor terkait seperti transportasi dan logistik.<sup>20</sup>

### **Implementasi Program Kerja Kadin Dumai sebagai Upaya Meningkatkan Kerjasama Perdagangan antara Pengusaha Indonesia dan Malaysia**

Kepengurusan Kadin Kota Dumai periode 2019-2024 dibentuk berdasarkan hasil dari Musyawarah Kota VI Kadin Dumai tahun 2018 yang menetapkan terpilihnya Zulfan Ismaini, SH sebagai ketua Kadin Kota Dumai menggantikan H. Syafrudin Atan Wahid di Hotel Grand Zuri pada Rabu, 28 Maret 2018. Ketua Kadin terpilih Zulfan Ismaini mengemukakan Visinya untuk menjadikan Kadin sebagai pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha berkaitan dengan pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi diseluruh Indonesia.

Adapun Misi yang dipaparkan oleh bapak Zulfan Ismaini yakni menata struktur dan organisasi Kadin Kota Dumai yang kuat sehingga menjadi mitra yang strategis dan efektif bagi pemerintah dan dunia usaha. Memperkuat kemandirian kadin dari segala aspek termasuk instruksi, keuangan, kepemimpinan dan hubungan eksternal. Memperkuat eksistensi pengusaha lokal dan UMKM untuk berkompetisi dalam persaingan pasar global. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dan strategis dalam kemitraan dunia usaha Kadin bersama serikat pekerja dan dunia pendidikan menciptakan inovasi teknologi.

Terdapat sepuluh program kerja yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia oleh Kamar

<sup>18</sup> Susilo Raharjo, "Implikasi Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 2, 4 (2024) hlm. 2164.

<sup>19</sup> Ghefra Rizkan Gaffara, "Dumai Port Area Development And Economics Approachs," *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2, 13 (2021), hlm. 82-84.

<sup>20</sup> Ghefra Rizkan Gaffara, "Dumai Port Area Development And Economics Approachs," *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 2, 13 (2021), hlm. 82-84.

Dagang dan Industri Kota Dumai pada periode 2019-2024, yaitu:

1. Misi Dagang I Kadin Dumai Tahun 2022
2. Misi Dagang II Kadin Dumai Tahun 2023
3. Kadin Dumai Expo Tahun 2023
4. Kunjungan Hormat Pemkab Meranti dan Pemko Dumai kepada Konsul Malaysia di Pekanbaru
5. Misi Dagang III Kadin Dumai Tahun 2024
6. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kadin Dumai dan Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd
7. Pemaparan Potensi Kota Dumai dalam Forum Koperasi IMT-GT Penang Tahun 2024
8. Kunjungan Hormat kepada TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka
9. Penetapan Desa Devisa Lidi Sawit di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai
10. Kunjungan Sosialisasi *Brand Awareness* oleh Port Tanjung Bruas serta Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kadin Dumai dan Tanjung Bruas Port Sdn Bhd.

Penerapan program kerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai turut mendukung upaya peningkatan kerja sama perdagangan antara pengusaha Indonesia dan Malaysia. Sebagai organisasi yang berperan dalam memfasilitasi dunia usaha, Kadin Dumai menjalankan berbagai program strategis guna memperkuat hubungan dagang lintas negara, menciptakan peluang ekspor yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Peran Kadin Dumai dalam menjembatani kepentingan pengusaha

dengan regulasi perdagangan yang berlaku di masing-masing negara membantu memperlancar arus barang dan jasa. Dengan keberadaan infrastruktur perdagangan yang semakin berkembang, program-program yang dijalankan Kadin Dumai mampu memaksimalkan potensi perdagangan yang ada.

Salah satu program kerja yang meningkatkan kerjasama perdagangan antara pengusaha Indonesia dan Malaysia adalah Misi Dagang Kadin Dumai, yang telah dilaksanakan secara berkala sejak 2022. Program ini memungkinkan pengusaha Indonesia untuk bertemu langsung dengan mitra dagang di Malaysia, membangun jaringan bisnis baru, serta memperluas cakupan pasar bagi produk mereka. Misi dagang juga menjadi wadah untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Dumai, seperti kelapa sawit dan produk turunannya, perikanan, serta barang industri lainnya. Dengan adanya interaksi langsung antara pengusaha kedua negara, program ini meningkatkan transparansi dalam perdagangan serta mempercepat proses kesepakatan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, Kadin Dumai Expo yang diadakan pada tahun 2023 juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerja sama perdagangan. Acara ini mempertemukan berbagai pelaku usaha dari Indonesia dan Malaysia dalam satu platform yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pameran produk, seminar bisnis, serta diskusi perdagangan. Dengan adanya expo ini, peluang untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional semakin terbuka, serta memberikan kesempatan bagi pengusaha Malaysia untuk memahami potensi produk Dumai. Keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan dalam expo ini juga menjadi bukti bahwa terdapat minat yang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi antara kedua negara. Dalam pelaksanaan Kadin Dumai Expo 2023 terdapat transaksi

sebesar 5,9 Milyar Rupiah antara pengusaha Indonesia dan Malaysia.

### **Implikasi dari Penerapan Program Kerja Kadin Dumai**

Program kerja Kadin Dumai juga mencakup upaya untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara pengusaha Indonesia dan Malaysia. MoU ini menjadi dasar hukum bagi kerja sama dagang yang lebih terstruktur, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan hubungan bisnis yang telah dibangun. Salah satu bentuk implementasi MoU ini adalah kerja sama antara Kadin Dumai dan Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd, yang membuka akses lebih luas bagi produk dari Dumai ke pasar Malaysia. Dengan adanya perjanjian kerja sama yang jelas, baik pengusaha Indonesia maupun Malaysia dapat menjalankan perdagangan dengan lebih aman dan terjamin, sesuai dengan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

Dari segi infrastruktur, pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Internasional di Dumai memberikan peluang besar bagi peningkatan kerja sama perdagangan. Dengan adanya peningkatan kapasitas pelabuhan serta fasilitas logistik yang lebih modern, arus perdagangan antara Dumai dan Malaysia semakin lancar. Infrastruktur yang memadai juga mempermudah proses distribusi barang dan mempercepat waktu pengiriman, sehingga pengusaha dapat mengoptimalkan rantai pasok mereka. Selain itu, konektivitas yang semakin baik dengan wilayah lain di Indonesia memungkinkan perdagangan dengan Malaysia berkembang lebih luas melalui Dumai sebagai pusat distribusi. Dalam upaya meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Malaysia, Kadin Dumai juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Tanjung Bruas Port Sdn Bhd.

Program kerja Kadin Dumai dapat diperluas dengan memanfaatkan teknologi

digital untuk mendukung perdagangan lintas negara. Penggunaan platform digital seperti business matching online dan marketplace internasional dapat mempercepat proses perdagangan serta memperluas jangkauan pasar bagi pengusaha Dumai. Dengan memanfaatkan teknologi, pengusaha dapat lebih mudah mengakses informasi tentang pasar Malaysia, memahami regulasi perdagangan yang berlaku, serta menjalankan transaksi dengan lebih efisien. Inovasi dalam digitalisasi perdagangan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kerja sama perdagangan antara Dumai dan Malaysia terus berkembang di era globalisasi.

Keterlibatan Kadin Dumai dalam forum ekonomi bilateral seperti IMT-GT dan SOSEK MALINDO juga semakin memperkuat kerja sama perdagangan. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum ini, berbagai peluang investasi dan perdagangan dapat terjalin dengan lebih baik. Forum ini menjadi wadah yang efektif untuk berbagi informasi tentang kebijakan perdagangan, regulasi ekspor-impor, serta peluang bisnis baru yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Malaysia. Dengan keterlibatan dalam forum ini, pengusaha memiliki akses lebih luas terhadap peluang perdagangan yang sebelumnya belum terjangkau.

Selain mendukung pengusaha besar, program kerja Kadin Dumai juga memberikan manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya dukungan dalam bentuk pelatihan, fasilitasi perizinan ekspor, serta promosi di forum internasional, UMKM di Dumai semakin memiliki kesempatan untuk menembus pasar Malaysia. Produk-produk UMKM seperti makanan olahan, kerajinan tangan, serta komoditas pertanian mendapatkan perhatian lebih dari pembeli Malaysia yang mencari produk berkualitas dari Indonesia.

Kerjasama perdagangan yang telah terjalin juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor dan investasi di Dumai. Kadin Dumai terus mendorong upaya peningkatan nilai tambah produk ekspor dengan memberikan fasilitasi kepada pengusaha untuk mengembangkan standar mutu yang lebih baik. Dengan adanya dorongan ini, produk ekspor dari Dumai semakin memiliki daya saing di pasar Malaysia dan pasar internasional lainnya.

### **Hambatan dalam Penerapan Program Kerja Kadin Dumai**

Hambatan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dapat dikategorikan menjadi hambatan tarif dan non-tarif, yang keduanya mempengaruhi arus perdagangan bilateral. Hambatan tarif merujuk pada kebijakan pajak yang dikenakan pada barang impor, yang bertujuan untuk melindungi industri domestik atau meningkatkan pendapatan negara. Meskipun kedua negara berada dalam kerangka kerja sama ASEAN yang menerapkan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dengan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* untuk menurunkan tarif, masih terdapat beberapa produk yang dikenakan bea masuk tertentu. Misalnya, Malaysia mengenakan tarif impor pada produk tekstil dan pakaian asal Indonesia untuk melindungi industri dalam negerinya, sementara Indonesia menerapkan tarif pada produk elektronik dan kendaraan bermotor dari Malaysia untuk mendukung industri manufaktur lokal.

Hambatan non-tarif dalam bentuk peraturan teknis dan standarisasi yang diterapkan Malaysia sering kali menjadi tantangan bagi produk impor, termasuk dari Indonesia. Regulasi ini mencakup persyaratan sertifikasi, pelabelan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas Malaysia, seperti Jabatan Standard Malaysia (DSM) dan Kementerian

Kesehatan Malaysia (KKM). Misalnya, produk makanan dan minuman yang masuk ke Malaysia harus memperoleh sertifikasi halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang sering kali memiliki prosedur dan persyaratan berbeda dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, produk elektronik yang diekspor ke Malaysia harus memenuhi standar keselamatan listrik yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia, yang dapat memperpanjang proses perizinan dan meningkatkan biaya kepatuhan bagi produsen Indonesia.

Regulasi yang kompleks ini dapat menghambat proses ekspor dari Indonesia jika produsen tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Misalnya, sebuah perusahaan makanan olahan Indonesia yang telah menyepakati kontrak dengan importir Malaysia dapat menghadapi kendala ketika produknya tidak lolos sertifikasi halal JAKIM, meskipun telah memiliki sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menyebabkan ketidakpastian bisnis dan berpotensi membatalkan transaksi, karena pembeli tidak dapat memasarkan produk yang tidak memenuhi regulasi lokal. Selain itu, prosedur perizinan yang memakan waktu dan biaya tambahan untuk pengujian produk di laboratorium yang diakui oleh otoritas Malaysia juga dapat mengurangi daya saing eksportir Indonesia, sehingga banyak kesepakatan perdagangan akhirnya tidak dapat direalisasikan akibat ketidaksesuaian dengan regulasi teknis dan standar nasional yang diterapkan Malaysia.

Hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 42 Tahun 2012, yang mengubah Permentan Nomor 18 Tahun 2008, telah berdampak signifikan terhadap arus perdagangan impor produk hortikultura, termasuk yang masuk melalui Pelabuhan Dumai. Peraturan ini memperketat ketentuan mengenai pintu

masuk impor produk hortikultura, dengan membatasi hanya beberapa pelabuhan utama yang diperbolehkan menerima komoditas tertentu. Sebelum perubahan regulasi ini, Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pintu masuk impor untuk produk hortikultura dari berbagai negara, termasuk Malaysia. Namun, setelah diberlakukannya Permentan Nomor 42 Tahun 2012, Pelabuhan Dumai tidak lagi termasuk dalam daftar pelabuhan yang diizinkan untuk menerima impor produk hortikultura, yang menghambat distribusi dan memperlambat proses perdagangan di wilayah tersebut.

Pembatasan ini terutama berdampak pada komoditas hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman pangan yang sebelumnya banyak diimpor melalui Dumai karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan Malaysia. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, importir harus mengalihkan pengiriman ke pelabuhan lain yang telah ditetapkan, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Belawan di Medan. Perubahan ini menyebabkan peningkatan biaya logistik dan distribusi, karena barang impor yang sebelumnya dapat langsung masuk melalui Dumai kini harus melewati jalur yang lebih panjang dan kompleks. Selain itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk juga menyebabkan penumpukan barang dan keterlambatan dalam proses bongkar muat, yang dapat menurunkan kualitas produk hortikultura yang bersifat mudah rusak.

Peningkatan biaya logistik secara domino juga turut dirasakan oleh eksportir Indonesia, terutama yang masih menggunakan kapal kayu konvensional. Eksportir Indonesia harus menanggung beban logistik dua kali lipat karena kapal yang mereka gunakan membebaskan biaya pulang-pergi kepada mereka karena tidak ada muatan yang bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia akibat pembatasan ini. Dampaknya adalah produk Indonesia

sulit untuk bersaing dengan kompetitor lainnya seperti Thailand dari sektor pertanian dan Vietnam dari sektor perikanan.

Selain aspek logistik, kebijakan ini juga berdampak pada pelaku usaha di sektor perdagangan dan pertanian di Dumai, termasuk importir, distributor, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasokan produk hortikultura impor. Banyak usaha yang mengalami kerugian akibat keterbatasan akses terhadap produk yang mereka butuhkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut. Selain itu, petani dan pelaku usaha hortikultura dalam negeri juga menghadapi tantangan baru karena keterbatasan pasokan bahan baku hortikultura yang sebelumnya lebih mudah didapatkan melalui impor di Dumai. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk melindungi pertanian domestik dan meningkatkan standar keamanan pangan, implementasinya telah menciptakan hambatan non-tarif yang signifikan bagi perdagangan lintas batas, khususnya dengan Malaysia, yang merupakan salah satu pemasok utama produk hortikultura ke Indonesia. Hal ini justru menimbulkan tindakan impor ilegal yang dapat merusak pasar serta berpotensi membawa penyakit tumbuhan karena tidak adanya proses karantina.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai memegang peran strategis dalam memperkuat kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui berbagai program kerja selama periode 2019–2024. Dengan posisi geografis Kota Dumai yang strategis di Selat Malaka, Kadin Dumai telah memanfaatkan konektivitas regional untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi. Program-program seperti misi dagang, pameran dagang, dan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan mitra Malaysia menunjukkan

komitmen Kadin Dumai dalam mempromosikan potensi perdagangan lokal ke pasar internasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti jalan tol Pekanbaru-Dumai dan pelabuhan peti kemas internasional turut berperan sebagai katalis peningkatan perdagangan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran Kadin Dumai. Adanya hambatan tariff dan hambatan non tariff menyebabkan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan Malaysia tidak dapat dieksekusi. Regulasi impor yang membatasi jenis barang tertentu melalui pelabuhan Dumai menjadi salah satu tantangan utama. Penerapan peraturan teknis dan standarisasi juga menghambat upaya ekspor produk Indonesia khususnya UMKM ke Malaysia karena keterbatasan mereka dalam menerapkan standarisasi tersebut. Selain itu, keterlibatan dunia usaha dalam forum bilateral seperti Sosek Malindo masih terbatas, sehingga peluang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis belum maksimal.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam merancang serta melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan hubungan perdagangan dengan Malaysia. Kadin Dumai dapat lebih aktif terlibat dalam memfasilitasi dialog antara pelaku usaha lokal dan mitra dagang di Malaysia melalui forum-forum bilateral maupun multilateral. Selain itu, Kadin Dumai perlu memperluas jaringan dan memperkuat keterlibatan dunia usaha di tingkat regional, seperti dalam forum Sosek Malindo dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), untuk mengadvokasi kepentingan perdagangan Kota Dumai secara lebih efektif.

Pemerintah daerah disarankan untuk mendorong penguatan kerja sama

perdagangan dengan Malaysia melalui penyelenggaraan forum resmi maupun non-formal yang melibatkan sektor swasta dan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan kebijakan insentif bagi eksportir lokal, penyediaan infrastruktur perdagangan yang memadai, dan promosi dagang lintas negara. Sementara itu, pemerintah pusat perlu meninjau kembali regulasi pembatasan impor yang diterapkan di pelabuhan Dumai, mengingat dampaknya terhadap peningkatan perdagangan ilegal dan tingginya biaya logistik. Kebijakan yang lebih fleksibel, disertai pengawasan ketat, akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif, mendukung daya saing pelaku usaha lokal, dan mengurangi hambatan yang mengganggu arus barang di wilayah perbatasan.

## REFERENSI

- Asian Development Bank. Regional and subregional program links: Mapping the links between ASEAN and the GMS, BIMP-EAGA, and IMT-GT. Manila: ADB, 2014.
- Pilgrim, Markus. National Chambers of Commerce A Primer on the organization and role of Chamber Systems. Washington, DC: Center for International Private Enterprise (CIPE), 1995.
- Adila, Wafa, Dewi Jannah, Latip, dan Erinaldi. "Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Dumai." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 20, no. 1 (June 25, 2023): 157–68. <https://doi.org/10.59050/jian.v20i1.180>.
- Anuar, Abdul Rahim, dan Abubakar Eby Hara. "Little Brother-Big Brother Relationship Through Malaysia-Indonesia Sosek-Malindo Initiatives."

- Proceedings of the 5th International Conference on International Studies (ICIS 2014) "GLOBALIZATION AND NATION-STATES: DYNAMICS AND IMPLICATIONS OF THE INTERACTIONS BETWEEN GOVERNMENT, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY," 2014, 710–21.
- Dollah, Ramli, Amrullah Maraining, Adi Jafar, Eko Prayitno Joko, and Nordin Sakke. "Exploring the Interdependence Model in Malaysia-Indonesia Relations: Insights from Sabah, Malaysia." *Intellectual Discourse* 32, no. 1. <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.1943>.
- Fau, Nathalie, Sirivanh Khonthapane, and Christian Taillard. *Transnational Dynamics in Southeast Asia: The greater mekong subregion and Malacca Straits Economic Corridors*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017.
- Gaffara, Ghefra Rizkan. "Dumai Port Area Development and Economics Approachs." *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2, 13 (2021).
- Irewati, Awani. "The Challenges of Constructing the Connectivity between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 1 (June 30, 2020): 1–15. <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i1.159>.
- Popescu, Diana Ramona. "The Role of Chamber of Commerce System in International Economic Relations." *The Romanian Economic Journal* 19, no. 62 (2016).
- Raharjo, Susilo. "Implikasi Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2, 4 (2024).
- Dinas Perdagangan Kota Dumai. *Potensi Ekspor Dumai 2024*, 2024.
- IMT-GT. "About IMT-GT." *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, January 11, 2023. <https://imtgt.org/about-imt-gt/>. Diakses pada 12 Maret 2024
- KADIN INDONESIA. "Sejarah Kadin - Kadin Indonesia." *KADIN INDONESIA*, 2024. <https://kadin.id/en/tentang-kadin/sejarah-kadin/>. Diakses pada 12 Maret 2024